



PENGARUH FDI DAN KONTRIBUSI SEKTOR JASA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PEMODERASI KUALITAS PERATURAN

Desak Ari Gita Wahyuni¹⁾, Suparna Wijaya^{2)*}

1) gita.wahyuni@kemenkeu.go.id, Kementerian Keuangan

2) suparnawijaya@upnvi.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*penulis korespondensi

Abstract

According to several reports from the international monetary authority, countries belonging to Sub-Saharan Africa still maintain their tax ratio below the threshold of 15%. In fact, the structure of tax revenues in many of these countries has improved in several periods. The slow growth of domestic revenue mobilization, the increase in the debt-to-GDP ratio and the occurrence of a budget deficit are clear manifestations that the tax policy needs to be reformed. This study focuses on analyzing the relationship between Foreign Direct Investment (FDI), the contribution of the Service Sector and the ratio of tax revenues in 33 countries in Sub Saharan Africa during the 2002-2019 period. Through a quantitative approach, this study uses multiple linear regression methods on panel data with the Fixed Effect Model estimation. The research results strongly state that all dependent variables can be explained by the independent variable by 89.19%. As independent variables, FDI and the contribution of the service sector are moderated by the regulatory quality variable. The conclusion stated FDI has a significant positive effect on tax revenues. However, the contribution of the service sector has a negative coefficient values but does not have a significant effect on tax revenues. This study also uses government effectiveness and the industrial sector's contribution to GDP as control variables.

Keywords: Foreign direct investment, Regulatory quality, Service sector contribution, Tax revenue

Abstrak

Menurut beberapa laporan dari puncak otoritas moneter internasional, beberapa negara yang tergabung dalam Afrika Sub Sahara tetap mempertahankan rasio penerimaan pajaknya di bawah ambang batas yaitu sebesar 15%. Padahal struktur penerimaan pajak di banyak negara tersebut telah membaik dalam beberapa periode. Pertumbuhan mobilisasi pendapatan domestik yang lamban, peningkatan rasio utang terhadap PDB dan terjadinya defisit anggaran merupakan manifestasi yang jelas bahwa kebijakan perpajakannya perlu dilakukan pembenahan. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis hubungan antara Foreign Direct Investment (FDI), kontribusi sektor jasa dan rasio penerimaan pajak pada 33 negara di Afrika Sub Sahara selama periode 2002-2019. Melalui pendekatan kuantitatif, studi ini menggunakan metode regresi linear berganda terhadap data panel dengan model estimasi *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian secara kuat menyatakan seluruh variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 89.19%. Sebagai variabel independen, FDI dan kontribusi sektor jasa dimoderasi oleh variabel kualitas peraturan. Kesimpulan penelitian ini adalah FDI berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak. Sementara itu kontribusi sektor jasa memiliki nilai koefisien negatif tetapi berpengaruh tidak signifikan terhadap rasio penerimaan pajak. Penelitian ini juga menggunakan variabel efektivitas pemerintahan dan kontribusi sektor industri terhadap PDB sebagai variabel kontrol.

Kata Kunci: Foreign direct investment, Kontribusi sektor jasa, Kualitas peraturan, Penerimaan pajak

PENDAHULUAN

Negara-negara dengan kondisi perekonomian yang lemah dan lembaga keuangan internasional yang selama ini menaruh perhatian hanya terhadap kondisi perekonomian mereka saat ini tengah disibukkan dengan pengelolaan sistem perpajakan. Ada beberapa alasan kenapa fokus terhadap sistem perpajakan harus ditingkatkan, salah satunya karena kemampuan untuk mengumpulkan penerimaan negara dari pajak sangat esensial bagi pembangunan ekonomi suatu negara dalam jangka waktu yang panjang (Chilima t.t.). Meskipun demikian, pentingnya penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar tidak lantas menjadi perhatian di negara-negara yang tergabung dalam Afrika Sub Sahara. Sebagian besar negara sub-Sahara menghadapi trilema yang berhubungan dengan perpajakan. Adanya masalah mendesak dalam penyediaan kebutuhan dasar bagi negara-negara dengan tingkat pendapatan yang rendah, seperti pelayanan publik dan pemenuhan sumber daya alam. Masalah kedua



adalah bahwa pada faktanya, masyarakat yang memiliki kekuatan politik dan kemampuan ekonomi yang memadai saja masih enggan membayar pajak. Apalagi golongan masyarakat yang tidak memiliki keduanya. Oleh karena itu, tantangan perpajakan yang sedang dihadapi oleh negara-negara Afrika Sub Sahara ini akan sangat berdampak pada masa depan demokratisasi negaranya.

Defisit fiskal sering menjadi masalah yang dihadapi beberapa negara di Afrika Sub-Sahara selama beberapa tahun terakhir. Ketidakseimbangan fiskal ini terjadi akibat meningkatnya pengeluaran dan perluasan basis pengeluaran, serta penurunan pendapatan (Ebeke & Ehrhart, t.t.). Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan bahwa pertumbuhan hanya dapat tercapai jika negara mengatasi akar penyebab ketidakseimbangan fiskal ini dengan mengurangi pengeluaran atau meningkatkan penerimaan. Beberapa negara telah mencoba membatasi anggaran belanja pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, namun langkah ini tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi fiskal. Oleh karena itu, salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak. Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sektor publik dan menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah memainkan peran penting dengan cara menginvestasikan sumber daya pada modal manusia dan infrastruktur institusional. Ketika pemerintah dapat melakukan upaya kecil untuk mengubah faktor-faktor struktural yang mempengaruhi penerimaan pajak, mereka dapat mengubah determinan penerimaan pajak menjadi kebijakan ekonomi dalam menarik investasi asing dan meningkatkan penerimaan dari sektor jasa. Perbedaan tinggi dalam tarif pajak efektif antara negara-negara menunjukkan adanya peluang baru untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa harus meningkatkan tarif pajak. Namun, penting untuk tetap realistis dalam meningkatkan rasio penerimaan yang diharapkan di negara-negara Afrika, mengingat rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan dominasi sektor agrikultur.

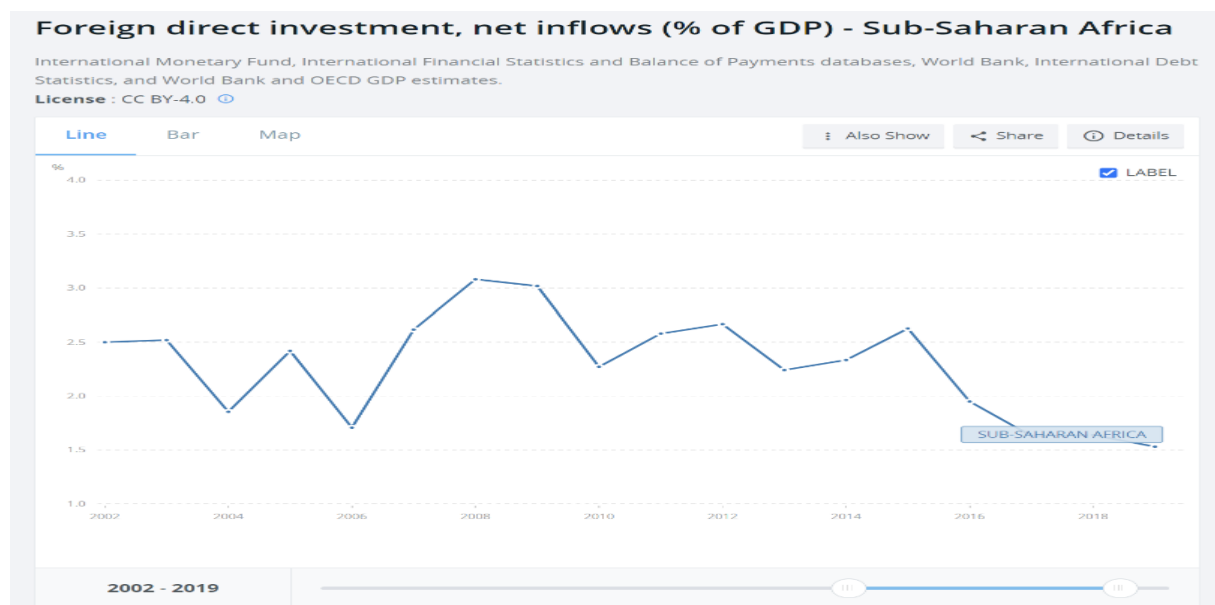
Pajak dikategorikan menjadi dua kategori antara lain pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung paling banyak dikenakan terhadap properti, penghasilan dan laba perusahaan. Sementara pajak tidak langsung diperhitungkan dari pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, kegiatan impor dll. Dalam kaitannya dengan pajak langsung, penerimaan pajak bergantung pada kebijakan di suatu negara, apakah kebijakan tersebut melonggarkan sistem pajak langsung untuk menarik investasi modal asing atau malah memaksakan/dibuat lebih kaku semata-mata untuk memperoleh penerimaan yang lebih tinggi. Kebijakan pelonggaran yang dapat dilakukan adalah dengan menerbitkan ketentuan *Tax Holiday* dan kredit pajak untuk penanam modal asing dan pengecualian pengenaan pajak terhadap material dan peralatan yang diimpor. Sementara itu pajak tidak langsung didasarkan pada jumlah penjualan barang dan jasa. Secara general, FDI memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan di sebuah negara sehingga akan berdampak pada kenaikan permintaan agregat dan peningkatan aktivitas ekonomi yang dapat membantu pemerintah dalam upaya menghasilkan penerimaan pajak tidak langsung. Menurut Macdougall (1960), kesejahteraan ekonomi dapat ditingkatkan melalui penerimaan negara yang dihasilkan dari keuntungan penanaman modal asing dan nilai modal saham yang lebih besar.

Menurut Bank Dunia (2017), pendapatan pajak harus mewakili antara 50-80% dari sumber yang dibutuhkan untuk membiayai SDGs. Namun, pendapatan pajak yang dimobilisasi oleh sebagian besar negara tersebut berada di bawah standar yang diusulkan oleh IMF, yaitu, 20% dari PDB (Thanh dkk., t.t.). Bersamaan dengan ini, akan relevan untuk dianalisis korelasi antara sumber keuangan eksternal dan mobilisasi pendapatan internal, khususnya Penanaman Modal Asing (FDI) dan penerimaan pajak. FDI adalah sumber utama pembiayaan eksternal untuk negara-negara berkembang. FDI telah menimbulkan beberapa perdebatan antara akademisi dan praktisi terkait dampaknya pada ekonomi negara tuan rumah melalui pengujian



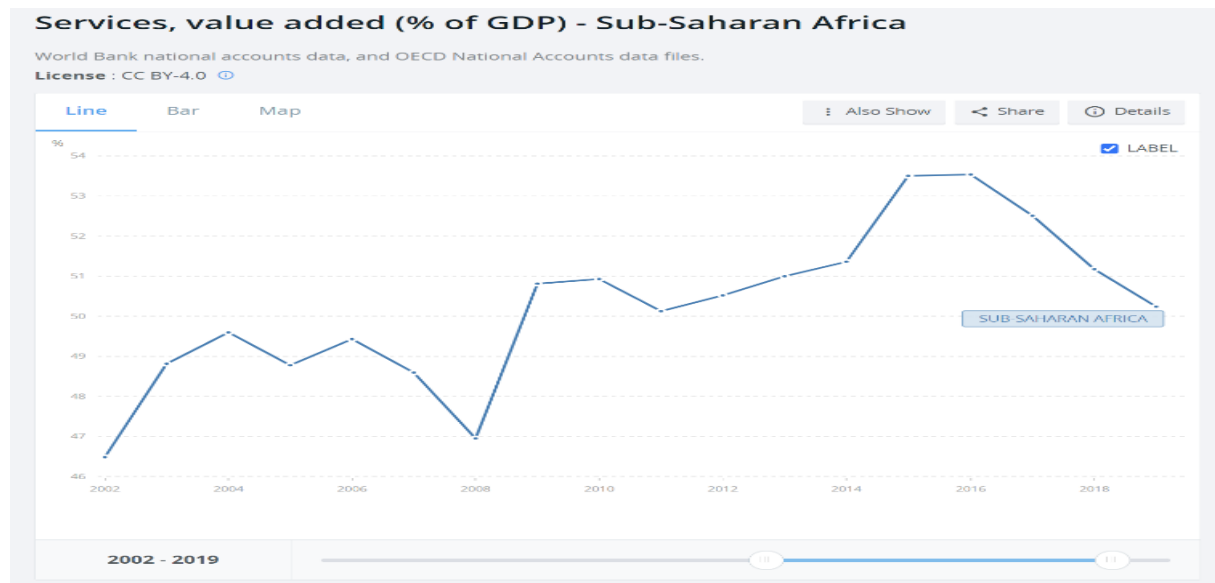
yang cermat terhadap determinan utamanya. Dampak FDI pada pertumbuhan ekonomi, transfer dan diseminasi pengetahuan, dan kemiskinan telah mendapat banyak perhatian dalam studi literatur, tetapi kontribusinya terhadap pendapatan pajak belum banyak dieksplorasi.

Pada prinsipnya, dengan berkontribusi pada produktivitas negara tuan rumah, FDI dapat meningkatkan penerimaan pajak secara langsung melalui pajak perusahaan, pajak penghasilan pribadi, pajak penghasilan, dan royalti dan secara tidak langsung melalui PPN. Secara langsung, perusahaan yang diuntungkan oleh FDI akan meningkatkan produktifitasnya sejalan dengan meningkatkan industri dan keuntungan komersialnya. Dengan demikian, kenaikan keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut akan memperluas basis dasar pengenaan pajak perusahaan dan dengan demikian dapat meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, ketika FDI mengalir ke sektor padat karya, pasokan pekerjaan dan permintaan upah akan meningkat. Peningkatan penghasilan akan memperluas basis pajak penghasilan pribadi. Menurut Zhang (2001), FDI meningkatkan penerimaan pajak melalui penciptaan lapangan kerja. Selain itu, difusi transfer teknologi dan pengetahuan yang dihasilkan dari FDI dapat meningkatkan produktivitas di negara tuan rumah dan dengan demikian menghasilkan sumber pendapatan (Nguyen, 2014). Ini akan memberikan kesempatan kepada perusahaan multinasional untuk mendapatkan keuntungan dari dividen dan memungkinkan administrasi publik untuk meningkatkan pendapatan pajaknya melalui pajak penghasilan. Secara tidak langsung, FDI dapat menghasilkan konsumsi dengan dua cara yaitu melalui penawaran dan melalui permintaan. Pertama, ketika FDI berkontribusi pada peningkatan produksi barang dan jasa yang ditawarkan di pasar dalam negeri, dapat meningkatkan penerimaan PPN. Kedua, di sisi lain, meningkatnya permintaan barang dan jasa karena peningkatan lapangan kerja dapat juga dapat meningkatkan penerimaan PPh. Tetapi kebijakan untuk menarik perusahaan multinasional tidak selamanya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Perusahaan multinasional tersebut dapat menerapkan kebijakan optimalisasi pajak melalui praktik *transfer pricing* yang malah akan menyebabkan pengurangan pendapatan dari perusahaan internasional. Hal Ini dapat mengurangi potensi pajak karena menurunnya laba perusahaan yang tercatat berarti mengurangi basis dasar pengenaan pajak perusahaan. Selain itu, persaingan antar negara untuk menarik FDI membuat negara-negara tersebut mengimplementasikan kebijakan insentif perpajakan melalui pembebasan pajak serta penurunan tarif pajak yang tentunya dapat mengoffset dampak positif yang diharapkan. Seperti yang dapat dilihat dari data *World Bank* terkait FDI di Afrika Sub Sahara selama periode 2002-2019, trendnya berfluktuatif dan





cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2008. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap hubungan antara rasio penerimaan pajak dan FDI di negara-negara tersebut.



Beberapa negara di Afrika masih didominasi oleh sektor agrikultur dengan beberapa karakteristik informal yang cukup substansial. Meskipun demikian, beberapa dekade terakhir ketika memasuki abad yang baru, terjadi pergeseran beberapa sektor ekonomi tepatnya dalam bidang komunikasi, informasi, teknologi dan industri jasa secara general. Trend pertumbuhan di negara-negara Afrika Sub Sahara menunjukkan bahwa persentase sektor agrikultur terhadap PDB mulai mengalami penurunan, sementara sektor manufaktur yang diantisipasi akan mengalami kenaikan malah stagnan di titik tertentu. Sebaliknya, *World Economic Forum Africa Competitiveness Report* (2015) menyatakan bahwa sektor jasa mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebagai persentase terhadap PDB. Seperti yang dapat dilihat pada trend pertumbuhan sektor jasa di Afrika Sub Sahara yang diperoleh dari data sekunder *World Bank* selama periode 2002-2019. Meskipun sempat mengalami penurunan yang drastis di tahun 2008, bak pelontar pada tahun berikutnya di 2009, kontribusi sektor jasa mengalami kenaikan yang sangat pesat hanya dalam jangka waktu 2 tahun, nilainya telah melebihi persentase sebelum mengalami penurunan di 2008 dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai persentase tertinggi pada 2016 selama periode 2002-2019.

Penurunan persentase sektor agrikultur dan manufaktur tercatat telah di-offset oleh kenaikan dan perluasan basis sektor jasa sebesar lebih dari 50% dari total PDB. Perubahan struktur di tengah-tengah agenda ekonomi global ini lah yang membuat para peneliti memiliki keinginan untuk melakukan pengkajian ulang terkait faktor-faktor ekonomi makro apa saja yang akan berdampak pada mobilisasi penerimaan pajak. Sebagai contohnya, selama 5 tahun terakhir, sektor perdagangan retail, pelayanan transportasi, informasi dan komunikasi, serta pelayanan terkait asuransi dan finansial telah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 5% atau lebih (*National Statistical Office website*). Sektor jasa yang mengalami pertumbuhan yang pesat ini berada dalam ranah yang dapat dikenakan pajak, berbeda dengan sektor agrikultur. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menginvestigasi variabel determinan dari rasio penerimaan pajak di suatu negara. Beberapa variabel memiliki hubungan yang secara general sama di setiap negara dan biasanya dapat diprediksi menggunakan asumsi ekonomi, sedangkan variabelnya lainnya memberikan hasil yang berbeda-beda tergantung dari lokus dan periode dilakukannya penelitian. Maka dari itu pada penelitian kali ini, peneliti ingin



menguji hubungan antara fluktuasi persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDB dan arus masuk FDI di negara-negara yang tergabung dalam Afrika Sub Sahara dengan rasio penerimaan pajak di negara tersebut selama periode 2002-2019.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan pada warga negara oleh pemerintah untuk menyediakan layanan sosial, memastikan kesejahteraan sosial dan menjamin peningkatan pertumbuhan perekonomian negara. Pajak dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas bisnis kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik dan mendukung fungsi-fungsi pemerintahan (Okafor, 2012). Sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah, pajak dapat berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial. Tingkat penerimaan pajak di sebuah negara atau wilayah secara universal diukur menggunakan rasio penerimaan pajak. Rasio penerimaan pajak adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak berkontribusi terhadap pendapatan total pemerintah suatu negara atau wilayah. Rasio ini mengindikasikan tingkat ketergantungan pemerintah pada pendapatan pajak dalam membiayai kegiatan dan program publik. Rasio penerimaan pajak dihitung dengan membagi total penerimaan pajak oleh total pendapatan pemerintah, kemudian dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persentase. Rasio ini biasanya diukur dalam bentuk persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah. Tingkat rasio penerimaan pajak dapat bervariasi secara signifikan antara negara-negara dan wilayah-wilayah yang berbeda, tergantung pada berbagai faktor, termasuk struktur ekonomi, kebijakan perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Negara-negara dengan sistem perpajakan yang kuat dan tingkat kepatuhan yang tinggi cenderung memiliki rasio penerimaan pajak yang lebih tinggi. Secara umum, rasio penerimaan pajak yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah mengandalkan pendapatan pajak sebagai sumber utama pendapatan publik, sementara rasio yang rendah menunjukkan ketergantungan yang lebih rendah pada pajak dan mungkin ada ketergantungan yang lebih besar pada sumber pendapatan lainnya, seperti minyak atau sumber daya alam.

Rasio penerimaan pajak di Sub-Sahara Afrika umumnya diperkirakan relatif rendah dibandingkan dengan rasio yang terlihat di negara-negara maju atau negara-negara berkembang lainnya. Menurut laporan *Fiscal Policy and Development: Human Development, Institutions, and Social Outcomes in Africa* pada tahun 2017, rasio rata-rata penerimaan pajak terhadap PDB di Sub-Sahara Afrika pada tahun 2015 adalah sekitar 17,2%. Namun, angka ini dapat bervariasi antara negara-negara di wilayah tersebut. Beberapa negara mungkin memiliki rasio penerimaan pajak yang lebih tinggi, sedangkan yang lain mungkin memiliki rasio yang lebih rendah. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya rasio penerimaan pajak di Sub-Sahara Afrika antara lain dilihat dari sektor informal yang besar, ketidakseimbangan struktural ekonomi, dan keterbatasan administrasi perpajakan. Sebagian besar ekonomi di wilayah ini terdiri dari sektor informal yang sulit untuk dipantau dan dikontrol secara efektif oleh otoritas pajak. Hal ini dapat mengurangi potensi pendapatan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Perekonomian Sub-Sahara Afrika sering kali didominasi oleh sektor-sektor yang kurang tertib dan tidak terbuka, seperti pertanian tradisional dan industri ekstraktif (Cg dkk., t.t.). Sumber pendapatan pajak yang potensial, seperti pajak penghasilan perusahaan dinyatakan terbatas dalam sektor-sektor ini. Kurangnya kapasitas administrasi perpajakan, termasuk sistem pengawasan dan kepatuhan wajib pajak yang rendah juga dapat menjadi hambatan bagi pengumpulan pendapatan pajak yang optimal. Untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak di Sub-Sahara Afrika, diperlukan upaya dalam memperkuat administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki tata kelola, dan mendorong pertumbuhan



sektor formal ekonomi. Selain itu, memperbaiki kebijakan perpajakan, termasuk memberlakukan kebijakan perpajakan yang adil dan efisien, juga dapat membantu meningkatkan rasio penerimaan pajak di wilayah ini. Salah satu kebijakan yang dapat meningkatkan rasio pajak adalah kebijakan kelonggaran pengenaan pajak terhadap Foreign Direct Investment dan pengutamaan kontribusi sektor jasa terhadap PDB.

Pajak dan FDI adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks ekonomi suatu negara. FDI mengacu pada investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari suatu negara ke negara lain. FDI melibatkan kepemilikan langsung atau kendali penuh atas perusahaan di negara tujuan investasi. Tujuan utama FDI adalah untuk memperoleh akses ke pasar baru, sumber daya yang langka, teknologi, dan keuntungan lainnya. FDI dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan produktivitas di negara penerima investasi (Gasparyene dkk., 2022). Ketika investor asing mendirikan perusahaan di negara penerima investasi, mereka akan membayar pajak perusahaan dan pajak penghasilan atas keuntungan yang dihasilkan. Penerimaan ini dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan dan ekspansi investasi asing. Selain itu, FDI juga dapat menciptakan lapangan kerja baru yang berarti adanya pajak yang dibayarkan oleh pekerja dan konsumsi yang dihasilkan dari pendapatan pekerja. FDI seringkali melibatkan transfer teknologi dan pengetahuan dari investor asing ke negara penerima investasi. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan lokal, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, penerimaan pajak juga dapat meningkat karena peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Meskipun FDI dapat meningkatkan penerimaan pajak, ada juga kemungkinan terjadinya efek penghindaran pajak. Beberapa perusahaan asing mungkin menggunakan strategi perpajakan yang kompleks untuk mengurangi kewajiban pajak mereka di negara penerima investasi. Hal ini bisa terjadi melalui praktik-praktik seperti transfer pricing yang tidak adil atau penempatan laba di negara dengan pajak yang lebih rendah. Jika efek penghindaran pajak terjadi, hal ini dapat mengurangi penerimaan pajak negara penerima investasi.

Hubungan antara pajak dan FDI dapat kompleks dan bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan perpajakan, stabilitas kebijakan, iklim investasi, infrastruktur, dan stabilitas politik suatu negara. Pajak yang tinggi dapat membuat suatu negara kurang menarik bagi investor asing, karena dapat mengurangi keuntungan yang diharapkan dari investasi. Di sisi lain, pajak yang rendah atau kebijakan perpajakan yang menguntungkan dapat meningkatkan daya tarik suatu negara bagi investor asing. Namun, perlu digarisbawahi bahwa keputusan investasi FDI juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti stabilitas hukum, regulasi bisnis, infrastruktur, tenaga kerja terampil, dan akses pasar. Pajak hanyalah salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi FDI, meskipun memiliki peran yang signifikan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan perpajakan yang menguntungkan dan kebijakan investasi yang menarik bagi FDI. Untuk menarik FDI, banyak negara memberikan insentif pajak khusus kepada investor asing, seperti perpanjangan jangka waktu pengenaan pajak yang lebih rendah atau pengurangan tarif pajak (Kimm Gnanon, 2017). Sementara insentif ini dapat meningkatkan aliran FDI, mereka juga dapat mengurangi potensi penerimaan pajak. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mempertimbangkan secara hati-hati kebijakan insentif pajak agar tetap seimbang antara menarik investasi dan memastikan penerimaan pajak yang memadai. Pendekatan yang seimbang antara kebijakan perpajakan yang efisien, keadilan pajak, insentif investasi, dan stabilitas kebijakan dapat mempengaruhi aliran FDI ke suatu negara dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Secara umum, sektor jasa memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi. Sektor jasa sering kali menciptakan nilai tambah yang tinggi melalui penyediaan layanan dan peningkatan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, sektor keuangan menyediakan jasa perbankan, asuransi, dan manajemen keuangan yang mendukung kegiatan ekonomi lainnya. Sektor jasa profesional seperti konsultasi, teknologi informasi, dan hukum juga dapat memberikan nilai tambah melalui pengetahuan khusus dan layanan berbasis keahlian. Sejalan dengan FDI, sektor jasa juga merupakan penyumbang utama dalam penciptaan lapangan kerja. Layanan seperti transportasi, pariwisata, perdagangan ritel, kesehatan, pendidikan, dan hiburan mempekerjakan banyak tenaga kerja. Pertumbuhan sektor jasa yang kuat dapat menghasilkan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga memiliki potensi untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Aamir dkk., 2011). Dengan meningkatnya pendapatan dan urbanisasi, permintaan terhadap layanan seperti perbankan, telekomunikasi, transportasi, dan pariwisata juga meningkat. Pertumbuhan sektor jasa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan melalui peningkatan investasi, konsumsi, dan ekspor jasa. Sebagai katalisator inovasi dan adopsi teknologi di sektor lain, sektor jasa sangat berperan dalam era digital. Layanan seperti teknologi informasi, riset dan pengembangan, dan konsultasi inovasi dapat mendorong efisiensi, produktivitas, dan peningkatan kualitas di sektor lainnya. Negara yang lebih tergantung pada sektor manufaktur atau sektor primer mungkin memiliki kontribusi sektor jasa yang lebih rendah. Di sisi lain, negara yang lebih berkembang dan berorientasi pada layanan cenderung memiliki kontribusi sektor jasa yang lebih tinggi terhadap PDB.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif (2020) terhadap 80 negara berkembang menyatakan bahwa FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio penerimaan pajak. Hasil penelitian yang sama juga disimpulkan oleh Aslam (2015) melalui analisisnya pada Sri Lanka menggunakan data selama periode 1996-2013. Sharma (2017) menyatakan arus masuk FDI berbanding lurus dengan penerimaan pajak di 20 negara berkembang di wilayah Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara. Sementara itu pada tahun 2016, Sarmiento menyelenggarakan penelitian dengan lokus di Uni Eropa. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kontribusi jasa (% dari PDB) berpengaruh positif terhadap rasio penerimaan pajak. Penelitian ini juga didukung oleh Tujo (2021) yang menyimpulkan bahwa sektor jasa terhadap PDB berbanding lurus dengan penerimaan pajak di Ethiopia. Penelitian terkait juga dilaksanakan di Ghana oleh Amoh dan Adom (2017). Mereka meneliti pengaruh FDI dan sektor jasa terhadap rasio penerimaan pajak. Hasil penelitian tersebut adalah FDI dan sektor jasa sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio penerimaan pajak.

Berdasarkan landasan teori di atas dan beberapa literatur review dari penelitian sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Foreign Direct Investment (FDI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio penerimaan pajak
2. Variabel kontribusi sektor jasa persentase dari PDB (SERV) berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio penerimaan pajak
3. Variabel kualitas peraturan (REG) memperkuat pengaruh variabel Foreign Direct Investment terhadap rasio penerimaan pajak
4. Variabel kualitas peraturan (REG) memperkuat pengaruh variabel kontribusi sektor jasa persentase dari PDB terhadap rasio penerimaan pajak
5. Variabel kualitas peraturan (REG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio penerimaan pajak



METODE

Untuk menganalisis pengaruh FDI dan kontribusi sektor jasa terhadap rasio penerimaan pajak, penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari laporan yang dipublikasikan secara resmi oleh *World Bank* dan *International Monetary Fund*. Data FDI, kontribusi sektor jasa (% dari PDB) dan rasio penerimaan pajak dari 33 negara di Afrika Sub Sahara selama periode 2002-2019 diolah menjadi data panel sehingga menghasilkan 594 data observasi. Definisi seluruh variabel yang terlibat dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Satuan	Unit
Variabel Dependen		
Rasio Penerimaan Pajak (TAX)	Persentase	% dari PDB
Variabel Independen		
Foreign Direct Investment (FDI)	Persentase	% dari PDB
Kontribusi Sektor Jasa (SERV)	Persentase	% dari PDB
Variabel Moderasi		
Kualitas Peraturan (REG)	Indeks	-
Variabel Kontrol		
Efektivitas Pemerintah (EFF)	Indeks	-
Kontribusi Sektor Industri (IND)	Persentase	% dari PDB

Analisis didasarkan pada data yang berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan model regresi linear berganda. Menurut Greene, analisis regresi dapat dikategorikan menjadi tiga model penelitian meliputi *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Sebelum melakukan analisis regresi data panel, penelitian ini melalui beberapa tahapan antara lain: mengumpulkan dan mengolah *data cross section* dan *time series* dari sumber data sekunder; men-declare set data menjadi data panel; dan melakukan uji asumsi klasik untuk menguji pemenuhan persyaratan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi dengan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji Asumsi	Indikator Uji	Hasil	Keterangan
Normalitas	$(\text{Prob} > \chi^2) > 0.05$	0.0000	Data tidak berdistribusi normal
Heteroskedastisitas	$(\text{Prob} > \chi^2) > 0.05$	0.0000	Varian data homoskedastis
Autokorelasi	$(\text{Prob} > F) > 0.05$	0.0000	Model terdapat gejala autokorelasi
Multikolinearitas	VIF < 10	FDI 7.94	Variabel moderasi terdapat gejala multikolinearitas
		SERV 2.77	
		REG 27.00	

Hasil menunjukkan data tidak berdistribusi dengan normal. Walaupun demikian, berdasarkan teorema limit pusat (Central Limit Theorem/CLT) karena jumlah data terdiri lebih dari 30 observasi ($N > 30$) maka sampel yang besar akan otomatis mengikuti distribusi normal, sehingga hasil uji normalitas dapat diabaikan. Teorema Limit Sentral (Central Limit Theorem/CLT) adalah salah satu prinsip fundamental dalam statistika dan teori probabilitas. Teorema ini menyatakan bahwa jika kita mengambil sampel yang cukup besar dari suatu populasi dengan variabel acak yang independen dan identik terdistribusi, maka distribusi rata-rata dari sampel tersebut akan mendekati distribusi normal, tidak peduli bentuk distribusi



populasi aslinya. Dalam konteks praktis, rata-rata sampel akan memiliki rata-rata yang mendekati rata-rata populasi dan varians yang lebih kecil dibandingkan dengan varians populasi, ketika ukuran sampel yang digunakan cukup besar. CLT memiliki beberapa implikasi penting dalam analisis statistik, termasuk:

1. Memungkinkan penggunaan pendekatan distribusi normal dalam berbagai metode inferensi statistik, seperti uji hipotesis dan interval kepercayaan.
2. Membantu menjelaskan mengapa distribusi rata-rata dari sejumlah besar pengamatan seringkali tampak mendekati distribusi normal, meskipun distribusi individu mungkin tidak normal.
3. Menjadi dasar bagi berbagai teknik pemodelan dan simulasi statistik yang bergantung pada asumsi distribusi normal.

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan variabel FDI dan SERV tidak terdapat gejala multikolinearitas sedangkan variabel moderasi REG terdapat gejala multikolinearitas. Namun, jika dirata-ratakan, data panel ini menunjukkan gejala multikolinearitas karena memiliki nilai mean VIF > 10 . Meskipun demikian, menurut Gujarati (2003), penelitian ini menggunakan data panel sehingga masalah multikolinearitas dapat diabaikan mengingat penggabungan data cross section dan time series merupakan salah satu "*rule of thumb*". "*Rule of thumb*" adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada aturan praktis atau perkiraan kasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan atau analisis. *Rule of thumb* multikolinearitas digunakan sebagai panduan kasar untuk mengidentifikasi adanya masalah multikolinearitas dalam model regresi. Multikolinearitas terjadi ketika ada korelasi tinggi antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi, yang dapat menyebabkan masalah dalam interpretasi hasil regresi dan mengurangi keandalan estimasi.

Berikut adalah beberapa situasi di mana dapat digunakan rule of thumb untuk mengidentifikasi adanya masalah multikolinearitas:

1. Koefisien determinasi (R-squared) yang tinggi secara bersama-sama dengan koefisien t yang tidak signifikan secara individu. Jika R-squared model regresi relatif tinggi, tetapi koefisien t yang mengukur signifikansi variabel independen secara individu rendah, hal ini dapat menunjukkan adanya multikolinearitas.
2. Korelasi tinggi antara variabel independen. Jika terdapat korelasi yang kuat antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi, hal ini dapat menjadi indikasi adanya multikolinearitas. Sebagai aturan praktis, korelasi antar variabel independen yang melebihi nilai ambang batas tertentu, misalnya 0,7 atau 0,8, dapat menunjukkan adanya multikolinearitas.
3. Variance Inflation Factor (VIF) yang tinggi. VIF adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat multikolinearitas dalam model regresi. Sebagai aturan praktis, jika VIF suatu variabel melebihi nilai ambang batas tertentu, misalnya 5 atau 10, hal ini menunjukkan adanya multikolinearitas.

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varian data bersifat homoskedastis karena nilai $(\text{Prob} > \chi^2) < 0.0$. Begitu pula ketika dilakukan pengujian autokorelasi nilai $(\text{Prob} > \chi^2) < 0.05$ sehingga model penelitian ini terdapat gejala autokorelasi. Menurut Nachrowi dan Mahyus Eka (2016), uji autokorelasi hanya memiliki satu nilai dalam satu model regresi. Jika dalam satu model ada beberapa nilai, hasil uji autokorelasi maka pengujian tersebut tidak lagi sah, sehingga dalam data panel, uji autokorelasi ini tidak diwajibkan dan maknanya dapat diabaikan. Dalam penelitian kali ini, jika terjadi pelanggaran asumsi autokorelasi peneliti kemudian menambahkan lag data variabel dependen sebagai tambahan variabel independen di dalam model atau menggunakan model AR (*autoregressive*).

Setelah uji asumsi klasik, tahapan analisis dapat dilanjutkan dengan menentukan model estimasi antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect*



Model dan *Random Effect Model* terhadap set data panel dengan melakukan uji *Chow Test*, *Lagrange Multiplier* dan *Hausman Test*. Hasil tes menunjukkan bahwa model *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model estimasi yang paling sesuai untuk menggambarkan pengaruh variabel dependen dan variabel independen yang penulis gunakan dalam penelitian ini seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.

$$Y = \alpha + (\beta_1 X_1)_{it} + (\beta_2 X_2)_{it} + (\beta_3 X_1 Z)_{it} + (\beta_4 X_2 Z)_{it} + (\beta_5 Z)_{it} + \varepsilon_{it}$$

Tabel 3. Pengujian Pemilihan Model Penelitian

Pengujian	Indikator Uji	Prob	Hasil	Keterangan
Uji Chow	(Prob>F) < 0.05	0.0000	Hipotesis nol ditolak	Model <i>Fixed Effect</i> lebih baik daripada Model <i>Pooled</i>
Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	(Prob>chibar2) < 0.05	0.0000	Hipotesis nol ditolak	Model <i>Random Effect</i> lebih baik daripada Model <i>Pooled</i>
Uji Hausman	(Prob>chi2) < 0.05	0.0012	Hipotesis nol ditolak	Model <i>Fixed Effect</i> lebih baik daripada Model <i>Random Effect</i>

Selain menguji variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian ini juga mengikuti model penelitian empiris di mana terdapat variabel kontrol yaitu efektivitas pemerintahan dan kontribusi sektor industri terhadap PDB. Efektivitas pemerintahan mencakup kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan publik, kebijakan fiskal, administrasi pajak, dan penegakan hukum terkait pajak. Pemerintahan yang efektif dapat merancang kebijakan pajak yang efektif dan rasional, dengan tarif pajak yang wajar dan sistem perpajakan yang adil. Kebijakan pajak yang baik dapat mendorong kontribusi yang lebih besar dari sektor ekonomi dan masyarakat, sehingga meningkatkan rasio penerimaan pajak. Efektivitas pemerintahan juga tercermin dalam administrasi pajak yang efisien dan profesional. Sistem administrasi pajak yang baik mencakup proses pemungutan pajak yang mudah dipahami, pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan pajak, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pajak. Dengan administrasi pajak yang baik, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dalam mengumpulkan pajak dan mengurangi kesenjangan antara potensi pajak dan pajak yang sebenarnya terkumpul. Sementara itu sebagian besar negara mengenakan pajak penghasilan perusahaan (*corporate income tax*) terhadap laba yang diperoleh oleh perusahaan industri. Sektor industri yang besar dan menguntungkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan melalui pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Tingkat pajak penghasilan perusahaan dapat bervariasi antara negara dan tergantung pada kebijakan pemerintah. Sektor industri biasanya merupakan salah satu penghasil tenaga kerja terbesar dalam suatu negara. Pemerintah dapat memperoleh penerimaan pajak melalui pajak penghasilan yang dikenakan pada upah yang diterima oleh pekerja industri. Pajak tenaga kerja dapat mencakup pajak penghasilan pribadi, kontribusi pajak sosial, dan potongan pajak lainnya yang berhubungan dengan tenaga kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio penerimaan pajak di Afrika Sub Sahara memiliki nilai rata-rata sebesar 13.01%, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata rasio penerimaan pajak negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yaitu sebesar 33.4%. Bahkan nilainya tidak lebih tinggi dari nilai rasio penerimaan pajak terendah di OECD yang disandang oleh Meksiko sebesar 17.9%. Rasio penerimaan pajak di Afrika Sub Sahara mencapai nilai terendah di angka 3.35% di Republik Demokratik Congo pada tahun 2003, sementara tertinggi dicapai oleh Seychelles pada tahun 2011 sebesar 36.99%, sesuai dengan status negaranya yang merupakan salah satu *high income country*. Seychelles diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan tinggi oleh Bank Dunia berdasarkan pendapatan per kapita dan standar hidup penduduknya. Seychelles merupakan destinasi wisata populer dengan pantai-



pantai yang indah, ekosistem laut yang kaya, dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Pariwisata merupakan sektor utama dalam ekonomi Seychelles, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Seychelles juga telah mengembangkan sektor keuangan yang kuat, termasuk perbankan dan layanan keuangan lainnya. Keberhasilan sektor ini telah membantu negara dalam menarik investasi asing, menyediakan layanan keuangan yang beragam, dan meningkatkan pendapatan nasional. Beberapa kebijakan ekonomi yang telah diterapkan oleh Seychelles untuk mencapai titik saat ini antara lain diversifikasi ekonomi, promosi investasi asing, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini telah membantu menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup penduduk.

Variabel FDI memiliki rentang nilai yang cukup tinggi dengan nilai terendah sebesar -11.19% di Mauritania pada tahun 2019 dan tertinggi sebesar 103.33% di Liberia pada tahun 2010. Meskipun merupakan negara yang tergolong low income country, Liberia terbukti berhasil menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat untuk menarik investor asing menanamkan modal usaha di negaranya (Prowd & Kollie, 2021). Liberia diketahui memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk bijih besi, timah, berlian, emas, dan kayu. Keberadaan sumber daya alam yang kaya ini dapat menarik investasi asing dalam sektor pertambangan dan ekstraksi, di mana perusahaan asing dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya tersebut. Pemerintah Liberia telah meluncurkan program-program insentif investasi yang menawarkan keuntungan, seperti pembebasan pajak, kemudahan berbisnis, dan perlindungan hukum bagi investor asing. Program-program ini dirancang untuk mendorong masuknya FDI ke negara tersebut. Sebaliknya kondisi di Mauritania sedang menghadapi tantangan dalam hal peraturan dan regulasi bisnis. Iklim bisnis yang tidak stabil, kurangnya perlindungan hukum yang memadai, dan birokrasi yang rumit dapat menjadi kendala bagi investor asing yang ingin beroperasi di negara ini. Perubahan pemerintahan dan ketidakpastian politik juga dapat menciptakan iklim yang kurang menguntungkan bagi investor. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi keputusan investor asing untuk menanamkan modal jangka panjang di negara tersebut.

Kontribusi sektor jasa dalam persentase dari PDB memiliki nilai rata-rata sebesar 46.63% dan range nilainya terendah 17.86% di negara Liberia pada 2002 dan tertinggi di Cabo Verde pada tahun 2006. Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, Liberia dikenal sebagai negara yang kaya akan komoditas alam tetapi pada awalnya sektor jasa malah cenderung kurang dikembangkan. Namun, kontribusi sektor jasa di Liberia terus mengalami perkembangan hingga mencapai nilai 48.91% di tahun 2019. Liberia telah mengalami pertumbuhan dalam sektor pariwisata dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Liberia dan mitra internasional telah bekerja sama untuk mempromosikan pariwisata negara tersebut. Penyediaan aksesibilitas yang lebih baik, pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi wisata, dan peningkatan kesadaran akan potensi wisata Liberia telah mendorong pertumbuhan sektor ini. Misalnya, industri perhotelan dan restoran telah berkembang untuk mengakomodasi meningkatnya jumlah wisatawan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Liberia juga turut andil dalam memberikan peluang baru dalam sektor jasa. Peningkatan aksesibilitas internet, pengembangan infrastruktur TIK, dan peningkatan literasi digital telah memungkinkan pertumbuhan bisnis dan layanan TIK di Liberia. Layanan seperti e-commerce, pengembangan perangkat lunak, outsourcing, dan layanan TI lainnya telah berkembang dengan adanya keterampilan teknis yang semakin meningkat di negara ini. Di sisi lain, persentase kontribusi sektor jasa di Cabo Verde yang tinggi sejalan dengan karakteristik perekonomiannya di negara tersebut. Cabo Verde memiliki ekonomi yang sangat tergantung pada sektor jasa. Sektor pariwisata menjadi salah satu kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi negara ini.



Cabo Verde menawarkan pantai yang indah, cuaca tropis, dan keanekaragaman budaya, yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Selain pariwisata, sektor jasa lainnya seperti keuangan, perbankan, dan jasa profesional juga berkontribusi pada ekonomi negara ini. Cabo Verde terus berusaha untuk mengembangkan sektor jasa sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Meskipun demikian, negara ini juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya alam, ketergantungan pada impor, dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Selanjutnya data deskriptif masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Data Deskriptif Variabel

Variabel	Mean	Standar Deviasi	Minimum	Maximum
TAX	13.01706	5.802018	3.35367	36.99774
FDI	5.18763	9.113275	-11.19897	103.33740
SERV	46.63938	9.799573	17.86371	72.58901
FDI.REG	-3.48984	9.500583	-109.22550	8.50099
SERV.REG	-23.94023	26.250850	-85.62569	74.03095
REG	-0.56921	0.553625	-1.85785	1.12727
EFF	-0.68350	0.620732	-1.77554	1.05699
IND	24.61609	12.194740	3.24309	66.17917

Setelah melakukan pemilihan model Fixed Effect, penulis menggunakan treatment lag data untuk mengatasi gejala autokorelasi yang terdapat pada data panel dalam penelitian ini, sehingga diperoleh hasil regresi seperti yang terlihat pada Tabel 5. dengan model penelitian final yang dapat dijabarkan dalam fungsi persamaan berikut:

$$\text{PDRB} = 5.206623 + 0.073846 \cdot \text{FDI} - 0.050773 \cdot \text{SERV} + 0.057449 \cdot \text{FDI.REG} - 0.007069 \cdot \text{SERV.REG} + 0.724139 \cdot \text{REG} - 0.930736 \cdot \text{EFF} + 0.015468 \cdot \text{IND}$$

Nilai koefisien determinasi (overall R-squared) adalah sebesar 0.8919, artinya variabel dependen rasio penerimaan pajak dapat dijelaskan dengan tingkat keyakinan 89.19% oleh variabel independen FDI dan kontribusi sektor jasa, variabel moderasi kualitas peraturan serta variabel kontrol berupa efektivitas pemerintah dan kontribusi sektor jasa secara simultan. Sementara itu sekitar 11.81% dipengaruhi oleh variabel lain dan komponen error. Dengan nilai Prob F-Statistik sebesar 0.0000 (kurang dari nilai alpha 5%), berdasarkan teori pengujian goodness of fit yang merujuk pada konsep yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana data yang diamati cocok atau sesuai dengan model atau hipotesis yang diajukan, nilai Prob F yang signifikan menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara simultan.

Tabel 5. Hasil Regresi Data Panel

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob (P> t)
C	5.206623	1.575221	23.99	0.001
FDI	0.073846	0.025028	2.95	0.001
SERV	-0.050773	0.024576	-2.07	0.019
FDI.REG	0.057449	0.024973	2.30	0.011
SERV.REG	-0.007069	0.021892	-0.32	0.373
REG	0.724139	1.136133	0.64	0.262
EFF	-0.930736	0.508465	-1.83	0.034
IND	0.015468	0.020402	0.76	0.224
Between R-Squared	0.9706	F-Statistic		84.61
Overall R-Squared	0.8919	Prob (F-Statistic)		0.0000

Berdasarkan pengujian parsial, variabel FDI memiliki nilai p value sebesar 0.001 (lebih kecil dari nilai alpha 5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa FDI berpengaruh signifikan



terhadap rasio penerimaan pajak di 33 negara Afrika Sub Sahara. Dengan nilai koefisien positif sebesar 0.073846 yang menunjukkan hubungan berbanding lurus antara FDI dan rasio penerimaan pajak. Semakin tinggi persentase FDI, semakin tinggi pula rasio penerimaan pajaknya. Jika FDI mengalami kenaikan sebesar 1% maka berdasarkan asumsi ceteris paribus, rasio penerimaan pajak juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.073846%. Hasil penelitian ini didukung oleh Camara (2023), yang meneliti pengaruh FDI pada 90 negara berkembang selama periode 1996-2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aliran masuk FDI berdampak pada kenaikan penerimaan pajak yang signifikan. Meskipun demikian, hasil tersebut tidak dapat digeneralisasi terhadap negara yang perekonomiannya tidak sensitif pada perubahan arus FDI. Penelitian yang dilakukan di Pakistan juga menunjukkan FDI memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak dengan nilai p value sebesar 0.039 (Mahmood & Chaudhary, 2013). Variabel moderasi berupa kualitas peraturan dalam hal ini memperlemah pengaruh FDI terhadap rasio penerimaan pajak. Dapat dilihat dari nilai p value yang meningkat menjadi 0.011 dan nilai koefisien yang menurun menjadi sebesar 0.057449.

Dampak positif dari FDI ini dapat bersifat langsung (melalui produktivitas, alih teknologi, pekerjaan penciptaan) atau tidak langsung (konsumsi, perdagangan, pekerjaan). Dengan menyediakan modal keuangan untuk membangun kegiatan di sektor formal, arus masuk FDI kemungkinan besar akan menyebabkan kenaikan penerimaan pajak pertambahan nilai. Selain itu, arus masuk FDI juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan basis dasar pengenaan pajak atas pendapatan tenaga kerja. Dengan meningkatkan ekspor dan memfasilitasi akses ke pasar persediaan, FDI juga berperan dalam meningkatkan pendapatan bea masuk (Anwar & Nguyen, 2011). Transfer pengetahuan dan diseminasi teknologi merupakan salah satu aktivitas yang dipicu oleh adanya arus masuk FDI dalam rangka persiapan untuk melakukan pembangunan pada sektor formal. Bagi negara-negara dengan sumber daya alam yang kurang memadai, arus masuk FDI akan diarahkan ke sektor-sektor tersebut sehingga kemungkinan besar akan berdampak pada pengembangan royalti, dengan nominal yang cukup tinggi. Sedangkan di negara dengan sumber kekayaan alam yang melimpah, peran lembaga demokratis sangat penting, tingkat transparansi yang tinggi akan menimbulkan respons yang positif dari pihak yang melakukan eksploitasi sumber daya alam atas pendapatan kena pajak yang bersumber dari dalam negeri. Seperti efek domino, terciptanya lingkungan kelembagaan yang baik kemudian akan menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.

Sementara itu variabel SERV atau kontribusi sektor jasa terhadap PDB sebelum dimoderasi dengan kualitas peraturan memiliki nilai p value sebesar 0.001 (kurang dari alpha 5%). Hal ini menunjukkan kontribusi sektor jasa berpengaruh signifikan terhadap rasio penerimaan pajak. Dengan nilai koefisiennya sebesar 0.050773 dan bernilai negatif. Semakin tinggi persentase kontribusi sektor jasa di sebuah negara maka rasio penerimaan pajaknya akan mengalami penurunan. Jika persentase sektor jasa mengalami kenaikan sebesar 1% maka berbanding terbalik dengan rasio penerimaan pajak yang akan turun sebesar 0.050773%. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Chilima (t.t.) di Malawi selama periode 2013-2018 di mana hasilnya menunjukkan bahwa kontribusi sektor jasa memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio penerimaan pajak. Pada penelitiannya dijelaskan bahwa hubungan berbanding lurus tersebut disebabkan karena pertumbuhan di sektor jasa tidak sama dengan pertumbuhan di sektor agrikultur maupun manufaktur. Pertumbuhan yang signifikan pada sektor jasa dilipatgandakan oleh peningkatan urbanisasi yang secara tidak langsung meningkatkan jumlah penawaran tenaga kerja dan berimbas pada kenaikan permintaan pada sektor jasa. Kenaikan sebesar 1% pada kontribusi sektor jasa terhadap PDB dapat menaikkan rasio penerimaan pajak sebesar 1.72% pada kondisi short run dan kenaikan sebesar 46% pada long run. Mawejje dan Munyambonera (2016) juga



berpendapat bahwa sektor jasa telah menjadi pemicu utama pajak pertumbuhan pendapatan di Uganda, sektor jasa yang tumbuh akan mendorong kenaikan pendapatan pajak. Igwebuike (2020) dalam penelitiannya terhadap Afrika Sub Sahara juga menyatakan adanya hubungan positif antara kenaikan kontribusi di sektor jasa dengan rasio penerimaan pajak dengan memperhatikan kebijakan administrasi, pemberian fasilitas dan pengecualian pengenaan pajak di negara-negara tersebut. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Amoh (2017) juga menghasilkan kesimpulan bahwa pertumbuhan rasio penerimaan pajak disebabkan oleh faktor perluasan basis sektor jasa di Ghana.

Hasil penelitian yang menunjukkan hubungan negatif antara kontribusi jasa dan rasio penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sektor jasa seringkali memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor lain, seperti sektor industri atau manufaktur. Banyak bisnis di sektor jasa, seperti jasa keuangan, jasa konsultasi, atau pariwisata, dapat memiliki struktur biaya yang berbeda dan terkadang lebih sulit untuk dilacak atau diatur daripada sektor manufaktur yang lebih terstruktur. Hal ini dapat menyebabkan potensi penghindaran atau penghindaran pajak yang lebih tinggi di sektor jasa, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi rasio penerimaan pajak. Faktor yang kedua adalah bersifat imaterial dan mobilitas. Beberapa bisnis di sektor jasa, seperti jasa keuangan atau perusahaan multinasional dalam industri teknologi, dapat memiliki aset atau pendapatan yang lebih sulit untuk dipantau dan diatur secara efektif oleh otoritas perpajakan. Selain itu, bisnis di sektor jasa seringkali memiliki mobilitas yang lebih tinggi, yang memungkinkan mereka untuk berpindah ke yurisdiksi dengan pajak yang lebih rendah atau menggunakan strategi perencanaan pajak yang rumit untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Kemudian ketika variabel kontribusi sektor jasa dimoderasi menggunakan kualitas peraturan nilai p value meningkat menjadi 0.373 (lebih dari nilai α 5%) sehingga pengaruhnya dianggap tidak signifikan terhadap rasio penerimaan pajak. Variabel kualitas peraturan memperlemah signifikansi tetapi mengubah nilai koefisien menjadi positif. Sektor jasa seringkali diatur oleh kerangka peraturan yang kompleks dan sulit untuk ditegakkan. Hal ini dapat menciptakan celah atau kesempatan untuk praktik perpajakan yang tidak sesuai, seperti penghindaran pajak atau penggunaan metode perencanaan pajak yang canggih. Ketika peraturan dan penegakan hukum tidak memadai, hal ini dapat mempengaruhi penerimaan pajak dari sektor jasa. Faktor yang terakhir adalah sektor jasa cenderung lebih bergantung pada tenaga kerja daripada sektor manufaktur atau industri. Penerimaan pajak yang dihasilkan dari sektor jasa yang didorong oleh upah tenaga kerja dapat lebih rendah dibandingkan dengan sektor yang lebih berorientasi pada modal. Ini karena pajak penghasilan yang dikenakan pada tenaga kerja memiliki batas atas yang lebih rendah dibandingkan dengan pajak modal.

PENUTUP

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa FDI memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio penerimaan pajak, kontribusi sektor jasa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio penerimaan pajak, variabel kualitas peraturan tidak berpengaruh terhadap rasio penerimaan pajak di Afrika Sub Sahara selama periode 2002-2019. Sementara itu ketika variabel independen dimoderasi dengan variabel kualitas peraturan, pengaruhnya diperlemah pada masing-masing variabel. Tidak terjadi perubahan yang cukup besar terhadap variabel FDI tetapi pada variabel kontribusi sektor jasa, pengaruh yang semula signifikan menjadi tidak signifikan dan nilai koefisien yang awalnya negatif menjadi positif. Terdapat hubungan kompleks antara FDI, kontribusi sektor jasa, kualitas peraturan, dan rasio penerimaan pajak.

FDI dapat berkontribusi pada pertumbuhan sektor jasa dalam suatu negara. Investasi asing dapat mendorong pengembangan industri jasa seperti jasa keuangan, pariwisata,



teknologi informasi, dan jasa konsultasi. Pertumbuhan sektor jasa yang kuat dapat meningkatkan kontribusi pajak dari sektor tersebut, karena sektor jasa umumnya memiliki potensi untuk menghasilkan penerimaan pajak yang signifikan. Kualitas peraturan perpajakan yang baik dapat memperkuat penerimaan pajak. Peraturan perpajakan yang jelas, stabil, dan transparan dapat menciptakan kepastian hukum bagi investor, mengurangi risiko penghindaran pajak, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan peraturan perpajakan yang baik, pemerintah dapat menjalankan sistem perpajakan yang efektif, mengumpulkan pajak dengan lebih efisien, dan meningkatkan penerimaan pajak dari FDI dan sektor jasa. Sementara itu arus masuk FDI dapat memiliki dampak yang bervariasi pada rasio penerimaan pajak. Investasi asing yang berfokus pada sektor yang memiliki potensi pajak yang tinggi, seperti sektor manufaktur atau ekstraktif, dapat meningkatkan rasio penerimaan pajak secara signifikan. Namun, sektor jasa yang dikuasai oleh FDI dapat memiliki pengaruh yang lebih rendah pada rasio penerimaan pajak karena faktor seperti penghindaran pajak atau karakteristik sektor jasa yang sulit dipantau. Kompleksitas hubungan antar variabel ini tidak bersifat linier dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, seperti kebijakan perpajakan, struktur ekonomi, tingkat pengawasan, dan tingkat korupsi. Selain itu, setiap negara memiliki konteks yang unik, sehingga pengaruh FDI, kontribusi sektor jasa, kualitas peraturan, dan rasio penerimaan pajak dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain.

Pemerintah dalam hal ini perlu berupaya untuk meningkatkan kualitas peraturan perpajakan dengan membuat aturan yang jelas, stabil, dan transparan. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan perpajakan yang adil dan mengikuti praktik internasional terbaik, serta memastikan penerapan dan penegakan hukum yang konsisten. Pemerintah juga dapat berupaya untuk menyederhanakan prosedur perpajakan, memperbaiki administrasi perpajakan, dan memperkuat kapasitas institusi perpajakan. Upaya lainnya dapat juga dilakukan dengan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penghindaran pajak atau kecurangan dalam sektor jasa. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat kapasitas lembaga perpajakan, meningkatkan kolaborasi antara lembaga perpajakan dan lembaga terkait, serta mengadopsi teknologi dan sistem informasi yang canggih untuk memantau dan memeriksa kepatuhan pajak. Keterlibatan pemerintah dalam kolaborasi internasional untuk memperbaiki transparansi perpajakan dan memerangi praktik perpajakan yang tidak adil atau agresif menjadi faktor penentu lainnya. Dengan bekerja sama dengan organisasi internasional, seperti OECD atau G20, pemerintah dapat mengadopsi standar internasional dan melakukan pertukaran informasi perpajakan yang lebih baik, sehingga mengurangi celah untuk penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aamir, M., Nasir, A., Hussain, S., Iqbal Khan, K., & Butt, S. (2011). Determinants of Tax Revenue: A Comparative Study of Direct taxes and Indirect taxes of Pakistan and India. Dalam *International Journal of Business and Social Science* (Vol. 2, Nomor 19). www.ijbssnet.com
- Addison, T., & Levin, J. (t.t.). The Determinants of Tax Revenue in Sub-Saharan Africa.
- Adenugba, A. A., & Ogechi, C. F. (2013). The Effect of Internal Revenue Generation on Infrastructural Development. A study of Lagos State Internal Revenue Service. *Journal of Educational and Social Research*. <https://doi.org/10.5901/jesr.2013.v3n2p419>
- Agbeyegbe, T., Stotsky, J. G., & Woldemariam, A. (2004). Trade Liberalization, Exchange Rate Changes, and Tax Revenue in Sub-Saharan Africa.
- Amoh, J. K., & Adom, P. K. (2017). The determinants of tax revenue growth of an emerging economy - the case of Ghana. *International Journal of Economics and Accounting*, 8(3/4), 337. <https://doi.org/10.1504/ijea.2017.092280>



- Aslam, A., Delepierre, S., Gupta, R., & Rawlings, H. (2022). Revenue Mobilization in Sub-Saharan Africa during the Pandemic, IMF COVID-19 Special Series.
- Bayera Tujo, D. (2021). Tax revenue Determinants and Tax Efforts in Ethiopia from 2000-2019-ARDL Approach. *International Journal of Public Administration and Management Research (IJPAMR)*, 7(2), 1–18. <https://doi.org/10.36758/ijpamr/v7n2.2021/01>
- Camara, A. (2023a). The Effect of Foreign Direct Investment on Tax Revenue. *Comparative Economic Studies*, 65(1), 168–190. <https://doi.org/10.1057/s41294-022-00195-2>
- Cg, O., Cheeseman, N., & Griffi, R. (t.t.). The Oxford Council on Good Governance Increasing tax revenue in sub-Saharan Africa: The case of Kenya. www.oxfordgovernance.org
- Chaudhry, I. S., & Munir, F. (2010). Determinants of Low Tax Revenue in Pakistan. *Dalam Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)* (Vol. 30, Nomor 2).
- Chilima, I. Y. (t.t.). Determinants of Tax Revenue Performance in Malawi: Evidence of Direction and Dynamic Inference by ARDL Modelling. http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4e.pdf
- Contents 2 Effect of exchange rate policy on GDP and GDP components: The Kyrgyz Republic Case. (t.t.). <http://www.icaap.org>
- Ebeke, C. H., & Ehrhart, H. (t.t.). Tax Revenue Instability in Sub-Saharan Africa: Consequences and Remedies. <https://shs.hal.science/halshs-00552230>
- Fjeldstad, O.-H., & Rakner, L. (2003). Taxation and tax reforms in developing countries : illustrations from Sub-Saharan Africa. Chr. Michelsen Institute.
- Gaspreniene, L., Klietk, T., Sivickiene, R., Remeikiene, R., & Endrijaitis, M. (2022). Impact of Foreign Direct Investment on Tax Revenue: The Case of the European Union. *Journal of Competitiveness*, 14(1), 43–60. <https://doi.org/10.7441/joc.2022.01.03>
- James Ayuba, A. (2014). Impact of Non-Oil Tax Revenue on Economic Growth: The Nigerian Perspective. *International Journal of Finance and Accounting*, 2014(5), 303–309. <https://doi.org/10.5923/j.ijfa.20140305.04>
- Kafkalas, S., Kalaitzidakis, P., & Tzouvelekas, V. (2014). Tax evasion and public expenditures on tax revenue services in an endogenous growth model. *European Economic Review*, 70, 438–453. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2014.06.014>
- Kimm Gnanngnon, S. (2017). Impact of Foreign Direct Investment (FDI) Inflows on Non-Resource Tax and Corporate Tax Revenue. *Dalam Economics Bulletin* (Vol. 37, Nomor 4).
- Kresna, M., Hakam, S., Fuady, A. H., Erwiza, D., Sumber, P. P., & Regional, D. (t.t.). RINGKASAN HASIL PENELITIAN: PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN DI SUB-SAHARA AFRIKA: PENGALAMAN ETHIOPIA RESEARCH SUMMARY: GROWTH AND DEVELOPMENT IN SUB-SAHARAN AFRICA: ETHIOPIA'S EVIDENCE. <https://doi.org/10.14203/jkw.v9i2.805>
- Kwesi, I. (t.t.). Standard-Nutzungsbedingungen. <http://hdl.handle.net/10419/249069>
- Mahmood, H. ;, & Chaudhary, A. R. (2013a). Impact of FDI on tax revenue in Pakistan. *Dalam Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences* (Vol. 7, Nomor 1). PJCSS. <http://hdl.handle.net/10419/188073>
- Mahmood, H. ;, & Chaudhary, A. R. (2013b). Impact of FDI on tax revenue in Pakistan. *Dalam Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences* (Vol. 7, Nomor 1). PJCSS. <http://hdl.handle.net/10419/188073>
- Mansour, M. (t.t.). Standard-Nutzungsbedingungen: A Tax Revenue Dataset for Sub-Saharan Africa: 1980-2010 *. www.ferdi.fr,



- NWADIALOR, PROF. E. O., & AGBO, E. I. (2020). Increasing Tax to GDP Ratio of Sub Saharan African Countries: Lessons from Advanced Economies. *International Journal of Research in Management Fields*, 4(1). <https://doi.org/10.26808/rs.rmfv4i1.02>
- Oecd. (2017). *Revenue Statistics in Africa 2022*. <https://oe.cd/revstatsafrica>
- Okafor, R. G. (2012). Tax Revenue Generation and Nigerian Economic Development. Dalam *European Journal of Business and Management* www.iiste.org ISSN (Vol. 4, Nomor 19). Online. www.iiste.org
- Olufemi, A. T., Jayeola, O., Oladele, A. S., & Naimot, A. O. (2018). Tax Revenue and Economic Growth in Nigeria. *Scholedge International Journal of Management & Development* ISSN 2394-3378, 5(7), 72. <https://doi.org/10.19085/journal.sijmd050701>
- Pendidikan, B., Pelatihan Keuangan, D., Keuangan, K., & Pratomo, A. W. (2019). *JURNAL BPPK THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON TAX REVENUE IN DEVELOPING COUNTRIES* (Vol. 13).
- Prakash Bholane, K. (t.t.). Analytical Study of Tax Revenue Collection in India Export Performance of Special Economic Zones in India View project Impact of MGNREGS on Poverty and Asset Creation: A Case Study of Drought Prone Vaijapur Tehsil View project. <https://www.researchgate.net/publication/339387081>
- Prowd, R. S., & Kollie, G. B. (2021). Determinants of Tax Revenue in Liberia: An Empirical Investigation.
- Thanh, H., Nguyen, T., Nguyen, H., Nguyen, M. H., & Goenka, A. (t.t.). How does FDI affect corporate tax revenue of the host country? www.univ-evry.fr/EPEE